

P-ISSN: 1858-2168
E-ISSN: 2621-251X

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**
PUSJAR SKMP LAN

VOLUME XXI NOMOR 2 DESEMBER 2025

Penanggung Jawab:

Dr. Muhammad Aswad, M.Si.

Editor in Chief:

Andi Dirga Putra, S.IP., M.Sc.

Mitra Bestari:

Prof. Ir. Achmad Djunaedi, MURP., Ph.D.
Prof. Dr. Gita Susanti, M.Si.
Prof. Dr. Haedar Akib, M.Si.
Prof. Dr. Nurliah Nurdin., MA
Prof. Dr. Puji Lestari, M.Si.
Prof. Dr. Sangkala, M.Si.
Dr. Asropi S.IP, M.Si.
Dr. Bevaola Kusumasari, M.Si.
Dr. St. Syamsudduha, M.Pd.
Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, M.Sc.

Section Editor:

Anita, S.Sos., M.Si.
Dr. Frida Chairunisa, M.Si.
Dr. Johan Tarru Mada, M.Si.
Ladiatno Samsara, S.IAN
Milawaty, S.S., M.M.
Murtafia, S.E.I., M.M.
Dr. Novayanti Sopia Rukmana, S.Sos., M.Si.
Nurhuda Firmansyah, SKM., MAP
Sitti Khadijah Herdayani, S.Psi., MM
Syakib Arsalan, S.Hi, LL.M
Dr. Wahyu Nurdiansyah Nurdin, S.Sos., M.Si.

Copy Editor & Layout Editor:

Andi Irsan Ismunandar, S.T., M.SP.
Anisa Mifrohatun Fathiyah, S.I.A., M.Sc.
Avrina Dwijayanti, S.IP., M.Phil.
Ayun Sri Damayanti, S.H., M.H.
Muhammad Iqbal, S.Sos., MA
Nur Khasanah Latief, S.IP.
Satria Eka Tri Laksana, S.IP., MAP
Yosafat, S.Ak.

Desain Grafis:

Anisa Mifrohatun Fathiyah, S.I.A., M.Sc.
Muhammad Iqbal, S.Sos., MA

Volume XXI Nomor 2 Desember 2025

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**
PUSJAR SKMP LAN

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan
Lembaga Administrasi Negara (Pusjar SKMP LAN)
Jl. Raya Baruga No. 48 Makassar, 90234
Tel.: (0411) 490101 | E-mail: jap@lan.go.id | URL: <http://makassar.lan.go.id/jap>

CALL FOR PAPER:

Redaksi menerima naskah hasil penelitian, analisis, kajian, pemikiran kritis, dan gagasan ilmiah dalam lingkup bidang administrasi publik yang belum diterbitkan di jurnal ilmiah lainnya. Naskah hendaknya diketik dalam Ms. Word menggunakan Bahasa Indonesia sepanjang 6000-8000 kata, ukuran A4, huruf Times New Roman ukuran 12, dan spasi 1,5. Abstrak ditulis dalam dwibahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris) masing-masing sepanjang 100-250 kata. *Submission online* melalui <http://makassar.lan.go.id/jap>. Redaksi berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi akan di-review oleh Mitra Bestari (*Peer-Reviewer*).



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2025

JURNAL
**ADMINISTRASI
PUBLIK**
PUSJAR SKMP LAN

Volume XXI Nomor 2 Desember 2025
Hal. 1-187

-
- | | |
|--|----------------|
| 1. KETIMPANGAN DISTRIBUSI GURU SEKOLAH DASAR NEGERI DAN PEMERATAAN AKSES MUTU PENDIDIKAN | 1-31 |
| Teguh Triwiyanto & Desi Eri Kusumaningrum | |
| 2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI SEKOLAH DASAR: STUDI KASUS KOTA MAKASSAR | 32-61 |
| Ady Hermawansyah, Nur Hijrah, & Nurman Sahar | |
| 3. KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK: STUDI KASUS SOSIALISASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD) DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG | 62-86 |
| Rezky Ahmadi, Erfina, Muhammad Arisal Asad, Sapri, & Herman Dema | |
| 4. KEPERCAYAAN DAN LITERASI PUBLIK: KUNCI EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI TINGKAT LOKAL | 87-109 |
| Gashela Asterina Diyanti & Riswanda | |
| 5. PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KOMITMEN ORGANISASI DI KANTOR DESA WILAYAH KABUPATEN TULUNGAGUNG | 110-140 |
| Rika Amalia | |
| 6. MEMBANGUN KETAHANAN PELAYANAN PUBLIK MELALUI PENERAPAN MANAJEMEN KEBERLANGSUNGAN BISNIS: STUDI KESIAPAN DAN KESADARAN BCM DI KEMENTERIAN KEUANGAN | 141-162 |
| Kurniawan Jabar Malik & Afrizal Rizky Barkah | |
| 7. ALTERNATIF SOLUSI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BARANG DALAM KEADAAN TERBUNGKUS (BDKT) | 163-187 |
| Pranandiva Dwi, Nita Nurliawati, Priyo Syamsul Nugraha, Ati Rahmawati, & Riky Rinaldy Maulan | |

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang budiman,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya **Jurnal Administrasi Publik** Volume XXI No. 2 Desember 2025. Edisi ini kembali hadir sebagai wadah diseminasi hasil penelitian, pemikiran kritis, dan kajian empiris di bidang administrasi dan kebijakan publik.

Pada edisi ini, kami menyajikan tujuh artikel yang merepresentasikan keragaman tema dan pendekatan penelitian dalam ranah administrasi dan kebijakan publik di Indonesia:

- **Pemerataan Pendidikan:** Teguh Triwiyanto dan Desi Eri Kusumaningrum membahas ketimpangan distribusi guru SD dan akses mutu pendidikan di Provinsi Jawa Timur melalui pendekatan kualitatif dan desain multisitus;
- **Perlindungan Anak:** Ady Hermawansyah dkk. membedah implementasi kebijakan perlindungan anak di Sekolah Dasar dengan studi kasus di Kota Makassar;
- **Digitalisasi Pelayanan Publik:** Rezky Ahmadi dkk. mengkaji aspek komunikasi dalam sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- **Literasi Publik:** Gashela Asterina Diyanti dan Riswanda menelaah pentingnya kepercayaan dan literasi publik dalam efektivitas implementasi kebijakan KIA;
- **Kepemimpinan Desa:** Penelitian mengenai pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya dan komitmen organisasi di tingkat desa wilayah Tulungagung;
- **Ketahanan Pelayanan Publik:** Kurniawan Jabar Malik dan Afrizal Rizky Barkah mendiskusikan kesiapan *Business Continuity Management* (BCM) di lingkungan Kementerian Keuangan;
- **Pengawasan Barang:** Pranandiva Dwi dkk. menawarkan alternatif solusi terkait pengendalian dan pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).

Redaksi menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penulis, mitra bestari, serta pihak-pihak yang telah mendukung proses penerbitan edisi ini. Kami juga mengundang para akademisi, peneliti, mahasiswa, dan pemerhati kebijakan publik untuk turut berkontribusi dengan mengirimkan karya tulisnya pada edisi-edisi berikutnya. Semoga setiap artikel dalam jurnal ini dapat menjadi inspirasi, sumber pengetahuan baru, serta kontribusi nyata bagi pengembangan teori dan praktik administrasi publik dan kualitas kebijakan di Indonesia.

Redaksi

Lembar abstrak ini boleh diperbanyak/copy tanpa izin dan biaya

Teguh Triwiyanto & Desi Eri Kusumaningrum

Ketimpangan Distribusi Guru Sekolah Dasar Negeri dan Pemerataan Akses Mutu Pendidikan

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 2 Desember 2025, Hal. 188-214

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan distribusi guru sekolah dasar negeri di Provinsi Jawa Timur dengan fokus pada tiga kabupaten yang merepresentasikan kondisi geografis dan sosial yang berbeda. Ketimpangan distribusi guru telah menjadi persoalan utama yang berdampak pada akses dan mutu layanan pendidikan dasar, terutama di wilayah terpencil dan tertinggal. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan desain multi-situs, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, diskusi kelompok terfokus, dan penelitian dokumentasi yang melibatkan pemangku kepentingan pendidikan di tingkat daerah dan sekolah. Analisis dilakukan secara interaktif untuk menggali pola ketimpangan dan dinamika kebijakan dari berbagai konteks lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi guru dipengaruhi oleh faktor kebijakan rekrutmen, penempatan yang tidak berbasis kebutuhan riil sekolah, keterbatasan insentif daerah, serta persepsi negatif terhadap lokasi tugas yang jauh dan sulit dijangkau. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis data lokal, termasuk desain sistem distribusi guru yang lebih adil dan insentif berbasis lokasi. Ketimpangan distribusi guru di Provinsi Jawa Timur mencerminkan tantangan yang kompleks dan multidimensional. Diperlukan upaya bersama dari berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang adil, responsif, dan berkelanjutan guna mewujudkan pemerataan pendidikan

Kata kunci: ketimpangan distribusi guru; sekolah dasar; kebijakan pendidikan

Ady Hermawansyah, Nur Hijrah, & Nurman Sahar

**Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah Dasar:
Studi Kasus Kota Makassar**

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 2 Desember 2025, Hal. 215-242

Kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah dasar masih menjadi persoalan serius, meskipun pemerintah telah menetapkan berbagai regulasi perlindungan anak di tingkat nasional maupun daerah. Kota Makassar sebagai wilayah perkotaan telah memiliki

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak. Namun, data menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak di sekolah dasar masih relatif tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak di sekolah dasar di Kota Makassar dengan menelaah dokumen kebijakan dan kerangka teori terkait kebijakan publik serta perlindungan anak. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan dari Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kepala sekolah, guru, orang tua, serta lembaga pemerhati anak, kemudian disertai dengan observasi partisipatif dan analisis dokumen di beberapa sekolah seperti, SD Kompleks Sambung Jawa, SD PAM Percontohan, SD Tamangapa, dan SD Bangkala III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan telah diimplementasikan dengan dukungan kolaboratif antara instansi dan partisipasi orang tua. Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan sarana dan prasarana, pemerataan pelatihan tenaga pendidik yang belum merata, serta belum terbentuknya tim penanganan kasus di beberapa sekolah. Koordinasi antara instansi dan sikap pelaksana yang proaktif menjadi faktor pendukung, tetapi komunikasi antara sekolah dan orang tua perlu diperkuat. Dalam hal ini, efektivitas kebijakan akan meningkat melalui peningkatan kapasitas pelaksana, pemerataan fasilitas, pembentukan tim khusus di setiap sekolah, penguatan program sekolah ramah anak, serta monitoring dan evaluasi.

Kata kunci: implementasi kebijakan; sekolah dasar; perlindungan anak

Rezky Ahmadi, Erfina, Muhammad Arisal Asad, Sapri, & Herman Dema

Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kasus Sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Sidenreng Rappang

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 2 Desember 2025, Hal. 243-273

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan inovasi strategis pemerintah dalam meningkatkan efisiensi administrasi kependudukan dan mendukung transformasi digital pelayanan publik. Namun, implementasinya di Kabupaten Sidenreng Rappang masih menghadapi tantangan yang signifikan, ditandai dengan tingkat adopsi yang rendah akibat keterbatasan akses informasi, pemahaman masyarakat yang minim, serta ketidakkonsistenan dalam sosialisasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi komunikasi kebijakan dalam sosialisasi IKD dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edwards III, yang menekankan tiga dimensi komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transmisi informasi masih terbatas karena ketergantungan pada media sosial dan kurangnya pendekatan langsung ke masyarakat. Kejelasan informasi juga menjadi Kendal sehingga menyebabkan banyak Masyarakat yang tidak memahami manfaat, prosedur aktivasi, dan kegunaan IKD dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, inkonsistensi dalam sosialisasi kebijakan menyebabkan disparitas informasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan, sehingga menghambat penerimaan masyarakat. Studi ini merekomendasikan strategi optimalisasi komunikasi kebijakan dengan memperluas cakupan sosialisasi melalui pendekatan multi-kanal yang

lebih inklusif, menyederhanakan bahasa komunikasi agar lebih mudah dipahami oleh semua kelompok masyarakat, serta memperkuat koordinasi antarinstansi guna meningkatkan efektivitas implementasi IKD di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kata kunci: komunikasi kebijakan; identitas kependudukan digital; implementasi kebijakan; transmisi informasi

Gashela Asterina Diyanti, & Riswanda

**Kepercayaan dan Literasi Publik: Kunci Efektivitas Implementasi Kebijakan
Kartu Identitas Anak di Tingkat Lokal**

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 2 Desember 2025, Hal. 274-303

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Tangerang yang mengindikasikan adanya masalah pada kepercayaan publik dan partisipasi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh kebijakan publik dengan mengintegrasikan pendekatan literasi publik dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang mengombinasikan survei kuantitatif dan studi kualitatif. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tangerang untuk menilai implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh legitimasi sosial, literasi kebijakan masyarakat, serta sejauh mana kebijakan selaras dengan nilai-nilai komunitas. Peningkatan kepercayaan publik dan keterlibatan masyarakat terbukti dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam program administrasi kependudukan seperti KIA. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan aspek kepercayaan dan literasi publik untuk mencapai hasil yang optimal. Rekomendasi yang dihasilkan antara lain: 1) integrasi indikator teknis dan sosial, 2) pembentukan forum partisipasi masyarakat, 3) peningkatan kompetensi dan akuntabilitas aparatur, dan 4) sosialisasi dan edukasi berkelanjutan.

Kata kunci: kebijakan publik; literasi publik; evaluasi kebijakan publik; kartu identitas anak; kepercayaan publik

Rika Amalia

**Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Terhadap Budaya Organisasi sebagai
Upaya Peningkatan Komitmen Organisasi di Kantor Desa Wilayah Kabupaten
Tulungagung**

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 2 Desember 2025, Hal. 304-335

Kepemimpinan transformasional dianggap memiliki peran kunci dalam membentuk budaya organisasi yang positif, sekaligus dapat meningkatkan komitmen anggota organisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung, untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung, dan untuk

mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi di Kantor Desa wilayah Kabupaten Tulungagung. Jenis penelitian ini kuantitatif dan pengumpulan data menggunakan angket sejumlah 200 responden. Penelitian ini menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan perangkat lunak AMOS 29.0. Hasil pengolahan data menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasi, terdapat pengaruh variabel kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi, dan terdapat pengaruh variabel budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. Kesimpulannya, kepemimpinan transformasional terbukti menjadi faktor penting dalam memperkuat budaya organisasi yang positif serta meningkatkan komitmen anggota organisasi, sehingga dapat menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam membangun tata kelola yang lebih efektif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Kata kunci: komitmen organisasi; budaya organisasi; kepemimpinan transformasional

Kurniawan Jabar Malik & Afrizal Rizky Barkah

Membangun Ketahanan Pelayanan Publik Melalui Penerapan Manajemen Keberlangsungan Bisnis: Studi Kesiapan dan Kesadaran BCM di Kementerian Keuangan

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 2 Desember 2025, Hal. 336-361

Kerangka keberlangsungan bisnis adalah bentuk keseriusan organisasi baik privat maupun publik untuk memastikan proses inti organisasi tetap berjalan walaupun terjadi gangguan (bencana alam, gangguan teknologi, krisis reputasi, serangan siber, dll.). Seperti diketahui, sektor publik memiliki peran penting dalam layanan esensial (kesehatan, keuangan negara, keamanan, transportasi). Gangguan yang terjadi secara tiba-tiba dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi hingga potensi runtuhnya kepercayaan publik karena kegagalan pemerintah untuk memastikan layanan publik tetap berjalan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh atas kondisi dan implementasi *Business Continuity Management* (BCM)/Manajemen Keberlangsungan Bisnis (MKB) di sektor publik, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Latar belakang studi ini didasari oleh kebutuhan pemerintah untuk memastikan keberlangsungan layanan publik di tengah meningkatnya potensi gangguan, baik bencana alam, non-alam, maupun ancaman teknologi. Penelitian menggunakan kerangka ISO 22301:2019 dan Pedoman MKB Kementerian Keuangan (KMK 520/2021) dengan metode *mix method* yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif dikumpulkan melalui survei kepada 17.904 pegawai (4.535 selaku anggota tim MKB dan 13.369 bukan anggota tim) untuk mengukur tingkat kesadaran dan kesiapan dalam empat tingkatan penilaian. Data kualitatif diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara mendalam pada lokasi risiko tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pegawai berada pada kategori *moderate high* (rata-rata 3,13) dan relatif merata, namun kesiapan operasional lebih rendah (rata-rata 2,95), dengan kesenjangan yang lebih jelas antara anggota dan non-anggota tim. Temuan kualitatif menyoroti bahwa implementasi MKB telah meliputi pengelolaan risiko yang semakin terintegrasi, pemenuhan dokumen MKB dalam kondisi pra bencana sebagai mitigasi risiko, dan pelaksanaan simulasi serta sosialisasi telah dilakukan. Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya strategi penguatan, termasuk: 1) meningkatkan kepemimpinan dan budaya sadar risiko di seluruh lini organisasi, 2) memperluas dan

memperdalam pelatihan berbasis simulasi dan pembelajaran pengalaman, dan 3) harmonisasi regulasi dan prosedur agar lebih adaptif dan responsif terhadap potensi gangguan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan literatur manajemen publik dan memberikan dasar kebijakan untuk meningkatkan ketahanan organisasi pemerintah dalam menghadapi disrupsi di masa mendatang.

Kata kunci: manajemen keberlangsungan bisnis; disrupsi; sektor publik; tata kelola pemerintahan; manajemen risiko

Pranandiva Dwi, Nita Nurliawati, Priyo Syamsul Nugraha, Ati Rahmawati, & Riky Rinaldy Maulana

Alternatif Solusi Pengendalian dan Pengawasan Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI Nomor 2 Desember 2025, Hal. 362-393

Pengendalian Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) bertujuan memastikan produk memenuhi ketentuan pelabelan dan kebenaran kuantitas. Belum optimalnya pengendalian yang dilakukan saat ini mendorong Direktorat Metrologi untuk merancang kebijakan pengendalian dengan pendekatan baru. Guna menemukan alternatif kebijakan yang tepat, diperlukan kajian ilmiah yang didasarkan pada pemilihan alternatif yang membandingkan pengorbanan dengan hasil yang dicapai. Penelitian ini mencoba memberikan alternatif pilihan kebijakan pengendalian BDKT dan merumuskan rekomendasi alternatif pilihan kebijakan yang dapat diambil menggunakan panduan teori model rasional dalam formulasi kebijakan Thomas R. Dye (1995) yang dianalisis dengan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengawasan, daya saing, mekanisme penilaian kesesuaian, dan peran pemangku kepentingan ditetapkan sebagai kriteria yang dapat mempengaruhi alternatif. Hasil penelitian menunjukkan prioritas alternatif kebijakan secara berurutan: 1) penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan, 2) penggunaan tanda kesesuaian, dan 3) pengendalian pengawasan. Alternatif prioritas adalah pengendalian melalui penggunaan tanda kesesuaian & pengendalian pengawasan dengan pertimbangan terjaminnya kesesuaian BDKT baik pada *pre-market* maupun pada *post-market*. Pelaksanaan dilakukan secara sukarela (*voluntary*) dengan memperluas sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen terkait tanda kesesuaian BDKT untuk meningkatkan *awareness* dengan mengoptimalkan penggunaan media dan teknologi.

Kata kunci: formulasi kebijakan; perlindungan konsumen; BDKT; metrologi legal; analytical hierarchy process

The abstract sheet may be reproduced/copied without permission or charge.

Teguh Triwiyanto & Desi Eri Kusumaningrum

Inequality in the Distribution of Public Elementary School Teachers and Equal Access to Quality Education

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 December 2025, p. 188-214

This study aims to map the distribution of public elementary school teachers in East Java Province, focusing on three districts that represent diverse geographical and social conditions. The inequality in teacher distribution has become a major issue that affects access to and the quality of basic education services, especially in remote and disadvantaged areas. Employing a qualitative approach and multi-site design, this study collected data through in-depth interviews, field observations, focus group discussions, and document analysis involving education stakeholders at the regional and school levels. Analysis was conducted interactively to explore patterns of inequality and policy dynamics within various local contexts. The results indicate that teacher distribution inequality is influenced by recruitment policies, placements that do not align with the actual needs of schools, limited regional incentives, and negative perceptions of remote assignment locations. This study provides policy recommendations based on local data, including the design of a more equitable teacher distribution system and location-based incentives. The unequal distribution of teachers in East Java Province reflects a complex and multidimensional challenge. Joint efforts from various stakeholders are essential to formulate and implement fair, responsive, and sustainable policies to achieve educational equity

Keywords: *teacher distribution inequality; elementary schools; education policy*

Ady Hermawansyah, Nur Hijrah, & Nurman Sahar

***Implementation Of Child Protection Policy in Primary Schools:
A Case Study of Makassar City***

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 December 2025, p. 215-242

Violence against children in elementary schools remains a serious concern, despite the existence of comprehensive national and local child protection regulations. In Makassar City, where Local Regulation Number 5 of 2018 on Child Protection has been enacted,

cases of violence in elementary schools remain relatively high, indicating a gap between policy formulation and implementation. This study aims to analyze the implementation of child protection policies in Makassar's elementary schools and identify key factors influencing their effectiveness. Employing a qualitative descriptive approach, the study reviewed policy documents and theoretical frameworks related to public policy and child protection. Data were collected through in-depth interviews with the Education Office, the Women's Empowerment and Child Protection Office, school principals, teachers, parents, and child protection agencies, supplemented by participatory observation and document analysis at several sites, including Sambung Jawa Complex Elementary School, PAM Elementary School, Tamangapa Elementary School, and Bangkala III Elementary School. The results indicate that while the policy has been implemented through inter-agency collaboration and parental participation, significant obstacles remain, such as limited infrastructure, uneven teacher training, and the absence of dedicated case management teams in some schools. While proactive coordination serves as a supporting factor, communication between schools and parents requires strengthening. The study concludes that policy effectiveness should be enhanced by increasing implementation capacity, ensuring equitable facility distribution, forming dedicated school-based teams, and strengthening monitoring and evaluation within child-friendly school programs

Keywords: policy implementation; elementary school; child protection

Rezky Ahmadi, Erfina, Muhammad Arisal Asad, Sapri, & Herman Dema

Communication in Public Policy Implementation: A Case Study of Digital Population Identity (IKD) Socialization in Sidenreng Rappang Regency

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 December 2025, p. 243-273

Digital Population Identity (IKD) is a strategic government innovation aimed at improving the efficiency of population administration and supporting the digital transformation of public services. However, its implementation in Sidenreng Rappang Regency still faces significant challenges, marked by a low adoption rate due to limited access to information, minimal public understanding, and inconsistency in policy socialization. This study aims to analyze the implementation of policy communication in IKD socialization using George C. Edwards III's policy implementation theory, which emphasizes three dimensions of communication: transmission, clarity, and consistency. This research was conducted using a descriptive qualitative approach through in-depth interviews, direct observation, and document analysis. The results show that information transmission is still limited due to a reliance on social media and a lack of direct approaches to the community. Information clarity is also an obstacle, as the public often lacks an understanding of the benefits, activation procedures, and usefulness of IKD in daily life. In addition, inconsistencies in policy socialization led to information disparities between urban and rural areas, hindering community acceptance. This study suggests optimizing policy communication by broadening multi-channel outreach, using clearer language for all groups, and enhancing agency coordination to improve IKD implementation in Sidenreng Rappang Regency.

Keywords: policy communication; digital population identity; policy implementation; information transmission

Gashela Asterina Diyanti, & Riswanda

Public Trust and Literacy: Key Factors in the Effective Implementation of Child Identity Card Policy at the Local Level

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 December 2025, p. 274-303

This research is motivated by the low ownership rates of Child Identity Cards (KIA) in Tangerang Regency, which signifies underlying issues in public trust and community participation. The objective of this study is to evaluate public policy impact by integrating public literacy and public trust approaches. A mixed-methods design, combining quantitative surveys and qualitative studies, was employed in Tangerang Regency to assess the implementation of the KIA program. The findings indicate that the success of policy implementation is significantly influenced by social legitimacy, community policy literacy, and the extent to which the policy aligns with community values. Increased public trust and community engagement are proven to enhance the effectiveness of population administration programs like KIA. Consequently, this study concludes that public policy evaluation must incorporate trust and literacy dimensions to achieve optimal outcomes. The research provides the following recommendations: 1) integrating technical and social indicators, 2) establishing community participation forums, 3) enhancing the competence and accountability of government officials, and 4) ensuring continuous socialization and education.

Keywords: *child identity card, policy evaluation, public policy, public trust, public literacy*

Rika Amalia

The Effect of Transformational Leadership on Organizational Culture and Organizational Commitment in the Tulungagung Regency Village Office

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 December 2025, p. 304-335

Transformational leadership is considered to have a key role in shaping a positive organizational culture, as well as increasing the commitment of organizational members. The purpose of this study is to determine the effect of transformational leadership on organizational commitment in the Village Office of Tulungagung Regency, to determine the effect of transformational leadership on organizational culture in the Village Office of Tulungagung Regency, and to determine the effect of organizational culture on organizational commitment in the Village Office of Tulungagung Regency. This type of research is quantitative and data collection uses a questionnaire of 200 respondents. This research uses Structural Equation Modeling (SEM) with AMOS 29.0 software. The results of data processing conclude that there is an influence between transformational leadership variables on organizational commitment, there is an influence of transformational leadership variables on organizational culture, and there is an influence of organizational culture variables on organizational commitment. In conclusion, transformational leadership has been proven to be an important factor in strengthening a positive organizational culture and enhancing members' commitment, thereby serving as

a reference for village governments in developing more effective governance that is oriented toward public service.

Keywords: transformational leadership; organizational culture; organizational commitment

Kurniawan Jabar Malik & Afrizal Rizky Barkah

Building Public Service Resilience Through Business Continuity Management Implementation: A Study on Ministry of Finance Readiness and Awareness

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 December 2025, p. 336-361

The Business Continuity Management (BCM) framework reflects the commitment of public and private organizations to keep essential processes operational amid disruptions such as natural disasters, reputational crises, or cyberattacks. In the public sector, particularly in vital services such as public finance, such disruptions threaten socio-economic stability and erode public trust. This study provides an overview of BCM's status and implementation in Indonesia's Ministry of Finance (MoF). Guided by ISO 22301:2019 and the MoF's BCM Guidelines (KMK 520/2021), we employed a mixed-methods approach with an explanatory sequential design, incorporating quantitative survey data from 17,904 employees (4,535 BCM team members, 13,369 non-members) and qualitative evidence from document reviews and in-depth interviews in high-risk units. Results show a moderately high awareness level (mean 3.13) that is broadly even across staff, while operational readiness is lower (mean 2.95), revealing a notable gap between team members and non-members. Qualitative findings indicate that BCM implementation already encompasses integrated risk management, pre-disaster documentation, and routine simulations and outreach. However, practical readiness remains uneven. We recommend strengthening experiential, scenario-based training; cultivating risk-aware leadership and culture across organizational layers; and harmonizing procedures to reduce fragmentation and improve responsiveness. The study underscores the need for sustained strategies to bolster organizational resilience in the public sector and offers policy-relevant insights to enhance the government's capacity to maintain continuity of public services amid growing disruptions.

Keywords: business continuity management system; disruption; public sector; governance; risk management

Pranandiva Dwi, Nita Nurliawati, Priyo Syamsul Nugraha, Ati Rahmawati, & Riky Rinaldy Maulana

Use of Conformity Marks: Solution to Optimize Control and Supervision of Pre-packaged Product

Jurnal Administrasi Publik Volume XXI No. 2 December 2025, p. 362-393

Control of Pre-packaged Products (BDKT) aims to ensure compliance with labeling and quantity accuracy. The current mechanisms have not been implemented optimally, prompting the Directorate of Metrology to design a new control policy. This study proposes alternative policy options for controlling pre-packaged products and formulates recommendations using Thomas R. Dye's rational policy formulation model (1995),

analyzed through the Analytical Hierarchy Process (AHP). Data were collected through interviews, observations, and document analysis. Supervision techniques, competitiveness, conformity assessment mechanisms, and stakeholder roles were defined as evaluation criteria. The results indicate that the policy alternatives, in order of priority, include: (1) conformity marks and supervisory control, (2) conformity marks, and (3) supervisory control. The selected alternative is the combined approach, as it ensures conformity at both pre-market and post-market stages. Implementation is carried out voluntarily by expanding outreach to businesses and consumers regarding BDKT conformity marks to raise awareness by optimizing the use of media and technology.

Keywords: *policy formulation; customer protection; pre-packaged products; legal metrology; analytical hierarchy process*